ANALISIS HUKUM TERKAIT PENJUALAN OBAT ABORSI MEREK CYTOTEK TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2023/ PN BGL)

RD Bayu Suryanegara^{a1}, Hendi Sastra Putra^{b2}, Sinung Mufti Hangabei^{c3}, Mikho Ardinata^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Kata Kunci:

Cytotec, Izin Edar, Obat Aborsi

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1120/Menkes/PER/XII/2008 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta yang terjadi. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil/obat merk Cytotec yang memiliki kandungan zat aktif Misoprostol tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat merk Cytotec tersebut, karena terdakwa bukan merupakan Apoteker, sehingga Terdakwa yang bukan merupakan Apoteker, pemilik Apotik atau Toko Obat yang berizin tidak dapat melakukan penjualan obat merk Cytotec yang termasuk golongan obat keras. Adapun kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan obat aborsi merk Cytotec tanpa izin edar (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN BGL) adalah faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum

ARTICLE INFO

Keywords:
Cytotek, Marketing Permit,
Abortion Medicine

ABSTRACT

Medicines circulating in the community must have a distribution permit, both domestically produced medicines and imported medicines, issued by the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM). Based on Article 106 paragraph (1) of the Health Law and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1010/MENKES/PER/XI/2008 concerning Drug Registration, amendments to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia NUMBER 1120/Menkes/PER/XII/2008 state that pharmaceutical preparations and Medical devices can only be distributed after obtaining a distribution permit. The type of research used by researchers is descriptive empirical research. Empirical research is research carried out by going directly into the field to see the facts that occur. To obtain data related to existing problems, the researcher took the research location at the Bengkulu District Court using data collection techniques in the form of interviews and documentation. Based on the research results and discussion of the problems discussed in this research in the previous chapter, it can be concluded that the defendant in distributing/selling Cytotec brand pills/drugs containing the active ingredient Misoprostol did not have the expertise and authority to distribute the Cytotec brand drug, because the defendant is not a Pharmacist, so that the Defendant who is not a Pharmacist, owner of a licensed Pharmacy or Drug Store cannot sell Cytotec brand drugs which are classified as hard drugs. The obstacles to implementing criminal sanctions for perpetrators of the crime of selling Cytotec brand abortion drugs without a distribution permit (Case Study Decision Number 146/Pid.Sus/2023/PN BGL) are the legal factors themselves or the regulations themselves. It can be seen from the existence of legal regulations, which were made by the government with the hope of a positive impact that would be obtained from law enforcement.

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Kesehatan mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasilkan obat-obatan lokal yang lebih murah dan tersedia bagi semua kalangan. Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi karena pada kenyataannya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan.¹

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1120/Menkes/PER/XII/2008 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Masalah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau obat palsu ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi. Khususnya pada Masalah abortus di Indonesia bukan masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan, ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini abortus masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek aborsi sering dilakukan oleh generasi muda apalagi pelajar.²

Peraturan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi Peredaran obat-obatan mulanya didominasi oleh *cannabis* (genus dari *dioecious*, tanaman obat yang termasuk family *cannabaceae*) atau daun ganja.³ Saat ini Peredaran obat-obat resep atau apotek justru yang menjadi populer di masyarakat. Penyalahgunaan fungsi obat sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Maraknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seseorang harus mengkonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat cytotec ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas, apoteker biasanya tidak akan memberikannya.

Pengedar obat aborsi online sangat marak dan mudah ditemukan di internet. Situs pengedar obat aborsi berhamburan di halaman mesin pencari.⁴ Tahun 2018, 2.217 situs/akun yang menjual obat tidak sesuai ketentuan direkomendasikan untuk di take down dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, termasuk penjual obat keras Cytotec untuk aborsi.⁵ Maraknya pengedar obat aborsi secara online kian meresahkan karena bergentayangan di berbagai situs pemerintah.⁶ Oleh karena itulah penjualan secara ilegalnya sangat marak sekali bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya. Cytotec banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan, terlebih untuk wanita hamil. Padahal obat tersebut terlarang dikonsumsi wanita sedang mengandung. Meski berdasar literature. Cytotec belum dimasukkan dalam daftar obat untuk kehamilan, tetapi obat ini sudah lama dipergunakan misalnya, disalahgunakan untuk aborsi.

¹ Yogha, Yudha Wira U dan Rehnalemen Ginting, "Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi di Kabupaten Sragen", Jurnal Recidive, Vol. 9, No. 1 Januari-April 2020, hlm. 80-81

² Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, "Aborsi di Indonesia", Journal of The Indonesian Medical Association, Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 68, No. 6 Juni 2018 hlm. 214

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2710613/warga-bandung-resah-marak-penjual-obat-aborsi-via-online>, diakses, tanggal, 28 April 2024

⁵ <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjeles-an-BPOM-RI-Tentang-Peredaran-Obat-Keras-yang-Dijual-Online-Daring.html>, diakses, tanggal, 28 April 2024

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 28 April 2024

Cytotec sebenarnya untuk mengobati ulkus lambung yang gejalanya mirip dengan orang hamil. Obat ini berisi mesoprostol, yang memiliki tiga efek samping, yaitu diare, nyeri perut, uterotonik. Hingga kini, mesoprostol sebagai bahan induksi persalinan masih menjadi perdebatan. Karena itu, perlu dilakukan penelitian guna membandingkannya dengan obat yang sudah diakui. Induksi adalah usaha manusia untuk membuat supaya seorang ibu hamil timbul kontraksi. Dalam hal ini, pemakaian mesoprostol harus hati-hati dan pengawasan ketat.⁷

Pemakaian berlebihan bisa menjadi hiperkontraksi yang menyebabkan kesakitan atau gawat bayi. Tidak jarang persalinan tersebut harus melalui operasi sesar. Jika penggunaan berlebihan ini terlambat diantisipasi, bisa mengakibatkan terjadinya robekan jalan lahir atau terjadi pendarahan. Karena itu, pengobatannya harus dengan histerektomi. Bila terjadi pendarahan, keadaannya akan fatal karena pendarahan tidak bisa dihentikan walaupun dengan histerektomi. Cytotec, jaringan uterus menjadi rapuh dan sukar dijahit.

Berkenaan dengan praktik aborsi, Untung menguraikan, memang bila obat ini dimasukkan ke dalam vagina maka portio yang terkena obat ini akan menjadi lembut dan apa yang ada di dalamnya bisa keluar. Dengan obat ini akan timbul kontraksi atau mules-mules, janin yang ada di dalamnya meninggal dan akhirnya timbul pendarahan. Pendarahan ini kadang-kadang sampai lama dan akhirnya harus dihentikan dengan kuret.⁸ Pasal 75 Undang-undang no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan penjelasan tentang syarat dilakukan tindakan aborsi. Pasal 346 KUHP dapat dikesampingkan dengan memegang asas "*Lex Specialis Derogate Lex Generalis*" artinya bahwa undang-undang khusus dapat dikesimpulkan karena adanya Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur lebih rinci tentang tindakan pengguguran kandungan.⁹ Tindakan pengguguran kandungan ini bertentangan dengan Hak asasi manusia yaitu hak hidup janin yang ada di dalam kandungan. Janin yang ada di dalam kandungan juga mempunyai hak untuk hidup oleh karena itu perlu dilindungi.

Sistem peredaran obat-obatan aborsi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap konsumennya tanpa dilengkapinya dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan), transaksi jual beli pun dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan HP, Blog online, dan Paket Jasa Kurir. Teknik tersebut digunakan untuk mengelabui anggota penegak Hukum.¹⁰ Terdapatnya mengedarkan/menjual obat Cytotec untuk penggugur kandungan dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat Cytotec untuk menggugurkan kandungan tersebut yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutirnya. Pil / obat merk Cytotec yang memiliki kandungan zat aktif Misoprostol yang merupakan Obat lambung golongan prostaglandin untuk Tukak Lambung, yang apabila dikontraindikasikan kepada wanita hamil dapat menyebabkan gugurnya kandungan karena pil/obat merk Cytotec menyebabkan peningkatan aktivitas kolagenase dan mengubah komposisi.

Urgensi dari penelitian ini adalah praktik aborsi bukan harus didukung tetapi harus dicegah karena dampak negatif yang terjadi mulai dari trauma psikologis, stress, penyesalan, kekecewaan. Aborsi tidak aman juga berisiko mengalami kematian bagi yang melakukannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukannya penelitian dengan terkait Analisis Hukum Penjualan Obat Aborsi Merek Cytotec Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 146/PID.SUS/2023/PN BGL).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum empiris difokuskan pada pengamatan dan analisis fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam, serta memberi penekanan pada interpretasi naratif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan penelitian, dan kemudian dianalisis secara deduktif untuk menginterpretasikan data dalam bentuk narasi.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat Aborsi Merek Cytotec Tanpa Izin Edar

⁷ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm., 231

⁸ Moh. Saifullah, *Aborsi dan Risikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 1, 2011, hlm., 5. Diakses dari file:///C:/Users/user/

⁹ Undang-undang no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁰ Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *OP. Cit*, hlm., 117

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai penangkapan terdakwa dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*"Terdakwa ditangkap oleh Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Timur Indah Raya Kota Bengkulu karena telah kedapatan mengedarkan obat merek Cytotec"*¹¹

Sementara itu, hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan terkait maksud dan tujuan terdakwa membawa obat merek Cytotec dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*"Maksud dan tujuan terdakwa membawa obat merek Cytotec tersebut adalah untuk mengantar pesanan dan akan melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Terdakwa membawa obat merek Cytotec untuk dijual belikan kepada konsumen tersebut sebanyak 6 (enam) butir, sesuai dengan pesanan dari konsumen"*¹²

*"Untuk mendapatkan obat merek Cytotec yang bisa untuk menggugurkan kandungan tersebut dari google yang terdakwa lupa alamat websitenya. Untuk pemesanan obat tersebut terdakwa melakukan dengan cara mengunjungi website tersebut dengan mengisi form pemesanan dengan mengisi nama dan alamat penerima barang. Setelah itu melakukan transaksi pembayaran"*¹³

*"Obat merek Cytotec yang Terdakwa bawa dan terdakwa perjualbelikan di Jl. Timur Indah Raya tersebut adalah merupakan Obat untuk penyakit Mag Kronis atau Obat untuk Tukak Lambung, namun apabila obat tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil maka akan memiliki efek samping yang dapat menggugurkan janin yang masih berusia kandungannya dibawah (satu) bulan. Terdakwa menjual obat merek Cytotec yang dapat menggugurkan kandungan usia lebih kurang 1 (satu) bulan tersebut sejak bulan akhir bulan Desember 2021 karena banyak orang yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa"*¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menguraikan dalam pertimbangan hukum bahwa terdakwa LIDYA SYNDITA Binti ADE SUDARYAT telah menjual obat merk Cytotec yang memiliki kandungan zat aktif Misoprostol yang merupakan Obat lambung golongan prostaglanding untuk Tukak Lambung, yang apabila dikontraindikasikan kepada wanita hamil dapat menyebabkan gugurnya kandungan karena pil/obat merk Cytotec menyebabkan peningkatan aktivitas kolagenase dan mengubah komposisi proteoglikan yang menyebabkan pelembutan dan penipisan serviks dengan efek samping terjadinya pendarahan hebat hingga menyebabkan kematian. Bahwa terdakwa menjual pill/obat merk Cytotec kepada orang-orang yang tidak dalam keadaan sakit tukak lambung dan terdakwa mengetahui orang-orang yang membeli obat merk Cytotec kepada terdakwa tersebut akan digunakan untuk menggugurkan kandungan. Bahwa terdakwa bukan Apoteker yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA) serta tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIPTTK, sehingga Terdakwa yang bukan merupakan apoteker, pemilik Apotik atau Toko Obat yang berizin tidak dapat melakukan penjualan obat keras merk Cytotec. Bahwa terdakwa mengetahui akibat buruk bila orang yang sedang hamil dengan usia kandungan dibawah 1 (satu) bulan mengkonsumsi obat merk Cytotec dapat menyebabkan keguguran kandungan, terjadinya pendarahan hebat hingga menyebabkan kematian akan tetapi terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir obat merk Cytotec 200 mg warna kemasan silver dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A15 warna biru serta simcard dengan nomor 0816390171. Terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan diperoleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Maka, selain dijatuhi pidana terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kendala Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat Aborsi Merek

¹¹ Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu

¹² Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu

¹³ Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu

¹⁴ Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu

Cytotek Tanpa Izin Edar

Adakah kendala Kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan obat abortif merek Cytotek tanpa izin edar (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN BGL) yang menjelaskan bahwa kekurangan sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi yang online karena sulit melacaknya. Yang lain tidak ada masalah apalagi kalau sudah tahu tempat dan keberadaannya. Pelaku di Bengkulu ini tidak mau mengaku barang di suplay darimana.¹⁵

Lokasi pelaku/penjual obat abortif secara ilegal sulit untuk diketahui keberadaannya. Menjadi salah satu kendala yang paling sering dilewati oleh aparat hukum dalam memberantas penjualan obat abortif ilegal. Kejahatan akan terus berkembang begitu pula dengan penjualan obat abortif ilegal, di mana para pelaku selalu memiliki modus yang berubah-ubah dalam artian bahwa pelaku penjualan obat abortif ilegal tersebut tidak hanya menjual obat abortif secara terbuka melainkan dengan membantu proses abortif juga.

Dalam penanganan kasus penjualan obat abortif ilegal, apakah dapat melibatkan kepolisian, maka jawaban dari yang menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan operasi wajib melibatkan unsure kepolisian untuk melakukan pendampingan dan juga pengawasan serta pembinaan.¹⁶

Mengenai kendala kepolisian dalam penanganan kasus penjualan obat abortif ilegal berbaya yang beredar dimasyarakat bahwa kendala secara umum tidak ada kendala tapi yang menjadi sedikit masalah itu adalah jual beli secara online yang sulit dicari. Pelaku berasal dari laur Bengkulu dan di Bengkulu hanya pengedarnya saja, tapi hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan karena pengamatan yang dimiliki Polres Bengkulu.¹⁷

Penjualan obat abortif ilegal tersebut sulit dimonitor karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya pelaku penjualan obat abortif ilegal. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, seringkali masyarakat khususnya konsumen obat abortif ilegal mengaku mengetahui pelaku penjualan obat abortif ilegal. Tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan alasan.

Mengenai kendala dalam penanganan kasus penjualan obat abortif ilegal menurut pihak kepolisian adalah sebagai berikut Yang jelasnya untuk hambatan yang paling utama itu masyarakat yang masih tidak sadar akan hukum, mereka hanya tahu untuk mencari keuntungan saja dan juga mereka tahunya apa yang telah mereka perbuat yaitu sampai hamil dapat digugurkan.¹⁸

Kurangnya kesadaran hukum didalam diri penjualan obat abortif ilegal merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap penjualan obat abortif ilegal. Dalam hal ini pelaku penjualan obat abortif ilegal cenderung acuh tak acuh terhadap undang-undang yang berlaku. Hal tersebut bukan dikarenakan ketidak tahuan pedagang sendiri terhadap adanya aturan-aturan itu, namun karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya kaedah-kaedah aturan tersebut dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang teratur sehingga untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan itu dianggap suatu hal yang biasa termasuk penjualan obat abortif ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan obat abortif merek Cytotek tanpa izin edar (studi kasus putusan nomor 146/PID.SUS/2023/PN BGL), hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut karena bukan Apoteker. Meskipun terdakwa meresahkan masyarakat, faktor meringankan seperti kerjasama dalam proses persidangan dan penyesalan terdakwa juga dipertimbangkan. Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kendala penerapan sanksi pidana termasuk faktor hukum, penegak hukum, sarana, fasilitas, dan masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum demi mencapai kedamaian dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu
2. Anzor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), OP. Cit, hlm., 117
3. Brigpol Rahmat Putra Selaku Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

¹⁵ Brigpol Rahmat Putra Selaku Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

¹⁶ Brigpol Rahmat Putra Selaku Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

¹⁷ Brigpol Rahmat Putra Selaku Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

¹⁸ Brigpol Rahmat Putra Selaku Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

4. Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, "Aborsi di Indonesia", *Journal of The Indonesian Medical Association, Majalah Kedokteran Indonesia*, Vol. 68, No. 6 Juni 2018 hlm. 214
5. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2710613/warga-bandung-resah-marak-penjual-obat-aborsi-via-online>, diakses, tanggal, 28 April 2024
6. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 28 April 2024
7. <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjeles-an-BPOM-RI-Tentang-Peredaran-Obat-Keras-yang-Dijual-Online-Daring.html>, diakses, tanggal, 28 April 2024
8. Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm., 231
9. Moh. Saifullah, *Aborsi dan Risikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2011, hlm., 5. Diakses dari file:///C:/Users/user/
10. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.
11. Undang-undang no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
12. Yogha, Yudha Wira U dan Rehnalemen Ginting, "Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi di Kabupaten Sragen", *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No. 1 Januari-April 2020, hlm. 80-81
13. Edi Sanjaya Lase, S.H Selaku Hakim Karir di Pengadilan Negeri Bengkulu